

XPRESS

Ketua dan 5 Anggota DPRD Kota Solok Tak Hadiri Sidang Paripurna, Keterangan Berbeda Dari Wakil Ketua dan Kabag Hukum

JIS Sumbar - SOLOK.XPRESS.CO.ID

Jun 20, 2022 - 12:04



SOLOK KOTA - Dari 20 orang anggota DPRD Kota Solok, 6 orang termasuk Ketua DPRD Hj.Nurnisma,SH, tidak menghadiri sidang paripurna penyampaian penjelasan empat Ranperda oleh walikota Solok H.Zul Elfian Umar, Senin pagi, 20 Juni 2022.

Dengan demikian, sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Solok Efriyon Coneng itu, hanya dihadiri oleh 14 orang anggota atau 70 persen dari jumlah total anggota.

Selain Ketua, anggota yang tidak hadir adalah Harizal Gerindra, Andi Mariato Golkar, Yosrizal Nasdem, Leo Murphy PDI-P, Andi Eka Putra dari PPP. Ketidakhadiran itu juga dilengkapi oleh Sekretaris Dewan Zulfahmi,SH,MH.

Berdasarkan informasi yang dirangkum dari Kabag Hukum Sekretariat DPRD

setempat Deni Hartatis, SH, dan jajaran, ketidakhadiran ketua DPRD Kota Solok beserta Sekretaris DPRD Kota Solok itu dikarenakan kegiatan sharing informasi bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Namun keterangan berbeda disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Solok Efriyon Coneng. Menurutnya, Ketua DPRD itu ke Palembang dalam rangka memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri Banyuasin untuk memberikan keterangan terkait hilangnya satu unit mobil truk milik Ketua DPRD Kota Solok itu yang telah ditemukan di wilayah tersebut.

Selain itu, terkait alasan ketidakhadirannya 5 anggota lainnya, diterangkan Kabag Hukum Setwan, Yosrizal dikarenakan tengah sakit. Sementara, Andi Marianti sedang melaksana dinas luar, Andi Eka Putra, Leo Murphy dan Harizal dengan keterangan izin.

Dari liputan media ini, adapun isi agenda kegiatan sidang paripurna tersebut adalah dalam rangka penyampaian nota penjelasan empat Ranperda yang meliputi tentang, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Solok tahun anggaran 2021. Perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank pembangunan daerah Sumatera Barat. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE). Sidang pun akan dilanjutkan siang terkait Pandangan Umum Anggota Fraksi - fraksi terhadap nota penjelasan 4 Ranperda tersebut. (Amel)